



Buletin Parlementaria

Nomor 1184/IV/I/2022 • Januari 2022



Kunjungi Kampung Nelayan Kali Baru, Gus Muhaimin Serap Aspirasi Masyarakat



3 Serahkan Bantuan PIP
Hingga BLT UMKM,
Puan Disambut
Hangat Warga Morotai



4 Batas Usia Pensiun TNI
Digugat, Sufmi Dasco
Minta Masyarakat Tak
Berspekulasi



9 772614 339005



Kunjungi Kampung Nelayan Kali Baru, Gus Muhaimin Serap Aspirasi Masyarakat



Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar saat berpartisipasi dalam penilaian lomba memasak seafood oleh nelayan perempuan. Foto: Munchen/nvl

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengunjungi Kampung Nelayan Kali Baru di Cilincing, Jakarta Utara. Dalam kunjungan tersebut, Anggota Dewan yang akrab disapa Gus Muhaimin itu menyerap aspirasi dari masyarakat pesisir Jakarta dan berkomitmen memperjuangkan nasib masyarakat nelayan di Indonesia.

“Saya bersyukur bisa bersilaturahmi dengan nelayan-nelayan di kampung ini. Dengan semangat tinggi saya akan turut memenuhi harapan dan memperjuangkan nasib nelayan di sini,” ujarnya saat berdialog dengan warga Kampung Nelayan Kali Baru, Jakarta Utara, Jumat (4/2). Untuk itu ia berpesan kepada pemerintah baik pusat dan daerah agar dapat turut memperhatikan nasib masyarakat nelayan.

Dalam kesempatan itu, Gus Muhaimin mendengarkan aspirasi dari perwakilan masyarakat, Abdul Manan, nelayan yang sudah berusia 75 tahun. Beberapa harapan nelayan yang disampaikan nelayan, khususnya fasilitas tangkap ikan yang masih belum mencukupi, seperti kapal dan jaring penangkap yang hanya berbahan plastik.

“Harapannya jala plastik bisa berganti dengan jala nilon yang bahannya lebih kuat, saya lihat di sini juga perlu bantuan berbagai fasilitas seperti fasilitas kesehatan,” ungkap Gus Muhaimin. Oleh karena itu, politisi PKB tersebut mengimbau agar Anggota Dewan dapil DKI Jakarta, khususnya area kampung tersebut, termasuk Anggota Dewan Fraksi PKB dapat mendorong pemerintah terkait untuk turun tangan.

Usai mendengarkan aspirasi, kelompok nelayan Kali Baru tersebut menobatkan Gus Muhaimin sebagai ‘Bapak Nelayan Jakarta’ atas komitmen dan kepeduliannya terhadap masyarakat nelayan. Selain berkeliling ke rumah warga, bersama Ketua Dewan Pembina Perempuan Bangsa Rustini Muhaimin Iskandar, Gus Muhaimin menyambangi tempat perempuan pengupas kerang.

Dalam kunjungan ini, Gus Muhaimin turut berpartisipasi dalam penilaian lomba memasak seafood oleh nelayan perempuan yang didampingi Perempuan Bangsa Jakarta Utara. Bersama dengan Wakil Ketua Persatuan Istri Anggota (PIA) DPR RI Rustini, Gus Muhaimin mengajak obrol peserta masak sembari menanyakan tentang keadaan keluarga nelayan. ■ ah/sf

Serahkan Bantuan PIP Hingga BLT UMKM, Puan Disambut Hangat Warga Morotai



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyerahkan bantuan PIP kepada siswa di Morotai. Foto: Gerald/nvl

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyerahkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP), bibit, hingga bantuan langsung tunai (BLT) UMKM di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara. Disalurkan kepada masyarakat Morotai, penyerahan bantuan dilakukan di SDN 1 Unggulan Daruba, Morotai Selatan, Maluku Utara, Selasa (8/2).

“Gunakan untuk keperluan sekolah ya,” pesan Puan kepada para siswa saat menyerahkan bantuan PIP secara simbolis kepada 276 siswa. Selain itu, politisi PDI-Perjuangan itu memeriksa kondisi sekolah sekaligus siswa saat melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) yang berjalan 100 persen di Morotai. Agar efektivitas proses belajar mengajar dengan kondusif, ia turut membagikan bantuan laptop untuk 986 siswa.

Pada kesempatan yang berbeda, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR ini menyerahkan bantuan 5.000 bibit pala yang

disalurkan melalui 5 kelompok tani. Tidak hanya itu, ia juga menyerahkan bantuan BLT UMKM dengan total dana senilai Rp486 juta untuk 156 pelaku UMKM di Morotai.

Usai menyerahkan bantuan tersebut, Puan lanjut meninjau pelaksanaan vaksinasi guna menindaklanjuti kendala vaksinasi kepada petugas kesehatan. Dirinya berharap edukasi dan sosialisasi terus digalakkan. Pasalnya, Morotai merupakan pulau terdepan di Indonesia yang dekat wilayah perbatasan. Dirinya khawatir masyarakat Morotai akan terdampak pandemi Covid-19.

“Karena vaksin sudah dipastikan halal, aman, dan bermanfaat. Vaksinasi akan menjaga kita dari bahayanya Covid-19. Ibu dan Bapak, pulang dari sini jangan lupa ajak anak-anak, saudara, teman, tetangganya yang belum divaksin untuk cepat segera divaksin,” tandas cucu Proklamator RI Bung Karno tersebut. ■ ts/sf



Kunjungi Kampung Nelayan Kali Baru, Gus Muhaimin Serap Aspirasi Masyarakat

3 Serahkan Bantuan PIP hingga BLT UMKM Puan Disambut Hangat Warga Morotai
4 Bonus Ura Penan TM Dianggap Sifat Dasar Kita Masyarakat Tak Berperwakilan

PENGAWAS UMUM Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Irfan S. Sos, MMST (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR
Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO
M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI
Guntur Dewanto, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI
Rizka Arinindy, S.Sos, Ridwan Budirman, S.I.P, Agung Hidayat, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patulli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus

FOTOGRAFER
Prima Danuritto, A.Md, Naefuroji, Jaka Nugraha, Ruri Sari Budiati, Arif Rachman, R. Kresno PD. Moepoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari

ANALIS MEDIA
Supian, S.E, Natasya Amanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayati, Rosnita

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito, Ihsan Syahrevi

IT MEDIA DIGITAL
Muhammad Hendar Assifa, S.Kom

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eny Sulistiawati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Yudi Kresna

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Arif Surachman, Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunnisa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Batas Usia Pensiun TNI Digugat, Sufmi Dasco Minta Masyarakat Tak Berspekulasi

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi permohonan uji materi atau *Judicial Review* (JR) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI ke Mahkamah Konstitusi (MK), terkait batas usia pensiun personel TNI. Menurutnya, permohonan uji materi yang diajukan ke MK itu perlu dihormati. Dasco juga mengimbau masyarakat agar tidak berspekulasi negatif mengenai permohonan *judicial review* tersebut.

“Pertama-tama, kita sudah tahu bahwa ada JR tersebut, kita hormati proses hukum yang berlaku. DPR sendiri sudah memberikan pendapatnya dalam Sidang Mahkamah Konstitusi,” ujar Dasco kepada awak media di selasar Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (8/12).

Politisi Partai Gerindra itu meminta masyarakat bersabar menunggu proses gugatan di MK yang masih berjalan. Ia pun berharap masyarakat tidak berspekulasi sebelum ada putusan dari MK mengenai *judicial review* UU TNI tersebut. “Maka itu, kami minta masyarakat untuk tidak berspekulasi tentang masalah gugatan JR UU TNI ini. Mari kita tunggu dan hormati putusan dari Mahkamah Konstitusi,” kata Dasco.

Di kesempatan berbeda, Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menyampaikan masa pensiun TNI menjadi perhatian Komisi I dalam revisi UU TNI yang masuk ke dalam Prolegnas 2020-2024. “Revisi UU TNI juga sudah masuk dalam Prolegnas *Long List* (2020-2024) dan soal usia pensiun ini menjadi salah satu hal yang diwacanakan,” kata politisi Partai Golkar itu.

Sebelumnya, Letkol (Purn) Euis Kurniasih bersama lima orang rekannya mengajukan *judicial review* atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI ke MK. Pasal-pasal yang diujikan berisi aturan mengenai batas usia personel TNI selama kedinasan.

Dalam Pasal 53 UU TNI berisikan tentang, “Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi

58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama.”

Sementara itu, Pasal 71 huruf a UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI berbunyi, “Usia pensiun paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama.” Dalam gugatannya, para pemohon meminta MK mengubah ketentuan tersebut. Mereka ingin usia pensiun anggota TNI sama dengan usia pensiun anggota Polri.

Adapun, Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) menyebut batas usia pensiun anggota Polri adalah 58 tahun. Perpanjangan masa bakti diberikan kepada anggota Polri yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian. ■ [ann/sf](#)

Wakil Ketua DPR RI
Sufmi Dasco Ahmad.
Foto: Ojji/mvi





Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel (tengah). Foto: Azka/nvl

Pembangunan di Indonesia Timur Harus Lebih Diperhatikan

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menegaskan, Indonesia Timur harus mendapat perhatian yang lebih baik dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Mengingat, lima daerah termiskin di Indonesia semuanya berasal dari Indonesia Timur.

Gobel menyampaikan hal ini saat menerima aspirasi dari para bupati dan wakil bupati dari Nusa Tenggara Timur (NTT) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/2). Dalam menerima aspirasi tersebut, Gobel didampingi oleh sejumlah Anggota DPR RI dapil NTT, di antaranya Ratu Ngadu Bonu Wulla, Jacki Uly, dan Julie Sutrisno.

“Kita harus memulai dengan pembangunan sumber daya manusia. Ada pepatah Jepang yang patut kita contoh yaitu, ‘sebelum membuat barang yang baik maka harus dimulai dengan membangun manusia yang baik terlebih dahulu’. Di sinilah pentingnya pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.

Gobel juga mengemukakan penting juga membangun ekonomi yang berbasis pada potensi yang dimiliki daerah. Ia mencontohkan, garam dari NTT memiliki kualitas yang premium, dan mendekati kualitas garam industri. Namun dalam kenyataan, harganya sering tak sebanding dengan kualitasnya. Untuk itu, perlu

strategi marketing dan narasi tentang keunggulan garam NTT.

“Selain itu, harus bersatu agar tidak ada banting-bantingan harga. Indonesia sangat membutuhkan garam dan ke depan kebutuhannya akan terus meningkat. Saat ini Indonesia masih mengimpor garam industri,” ungkapnya.

Gobel menilai, kondisi tersebut merupakan potensi yang harus betul-betul dimaksimalkan oleh NTT. “Butuh sentuhan lebih lanjut agar ekonomi garam di NTT menjadi kuat,” ucap Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) ini.

Menurut Gobel, masih banyak potensi yang dimiliki NTT, seperti kain tenun, beras Sumba, pariwisata, dan lain-lain. Mereka membutuhkan alat-alat berat untuk membuat jalan perintis, memperluas lahan pertanian, membangun embung, dan lain-lain. Mereka juga menghadapi keterbatasan jumlah tenaga kesehatan seperti dokter, apalagi dokter spesialis.

“Saya akan teruskan ke kementerian terkait, karena ini sangat penting bukan hanya bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat NTT, tapi juga bagi Indonesia,” tandas legislator dapil Gorontalo itu. ■ es

DPR Setujui Penjualan Dua Eks Kapal Perang RI

Rapat Paripurna DPR RI ke-14 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 mengesahkan persetujuan atas penjualan dua unit eks kapal perang, yakni KRI Teluk Mandar-514 dan KRI Teluk Penyu-513. Hal ini menindaklanjuti permohonan Presiden Joko Widodo dalam suratnya kepada Pimpinan pada DPR 11 Januari 2022 lalu.

Persetujuan diberikan setelah Wakil Ketua Komisi I DPR Anton Sukartono Suratto menyampaikan laporan Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo

Subianto di hadapan Rapat Paripurna. Laporan tersebut membahas rencana penjualan KRI Teluk Mandar 514 dan KRI Teluk Penyu 513 beberapa waktu lalu.

“Komisi I telah mendengarkan penjelasan Menkeu dan Menhan terkait kapal KRI Teluk Mandar dan KRI Teluk Penyu, Komisi I DPR memutuskan menyetujui usulan penjualan kapal Eks KRI Teluk Mandar 514 dan Kapal Teluk Penyu 513 sesuai dengan surat Presiden RI perihal permohonan persetujuan penjualan barang milik negara,” kata Anton dalam laporannya pada Rapat

Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/2).

Usai pemaparan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, selaku pimpinan Rapat Paripurna DPR menanyakan kepada peserta rapat apakah hasil keputusan Komisi I DPR bisa disahkan sebagai keputusan DPR. “Kami menanyakan kepada sidang terhormat, apakah penjualan barang milik negara KRI Teluk Mandar dan KRI Teluk Penyu apakah bisa disetujui?,” tanya Dasco. “Setuju,” jawab anggota dewan.

Sebelumnya, dalam Rapat bersama Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan dan Kepala Staf Angkatan Laut beberapa waktu lalu, Menhan RI Prabowo Subianto menyampaikan alasan penjualan karena kondisi dua kapal buatan Korea Selatan pada 1980 itu.

Menurut Menhan, secara teknis kondisi kapal sudah tidak layak untuk digunakan karena bangunan kapal banyak yang keropos. “Secara teknis bahwa kondisi material tidak layak digunakan karena bangunan kapal banyak yang keropos, kata Menhan Prabowo dalam rapat dengan Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (27/1).

Selain itu, Menhan Prabowo melanjutkan “kondisi mesin kelistrikan, peralatan navigasi komunikasi, dan instrumen di anjungan dua kapal tersebut juga sudah tidak bisa digunakan. Bahkan, menurutnya, kondisi *platform* sudah tidak layak digunakan.” Tidak efisien untuk diperbaiki atau di-*replacement*,” tandas Menhan Prabowo. ■ **ann/sf**

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto. Foto: Andri/mvl



DPR Setujui RUU Nomor 12 Tahun 2011 Jadi RUU Inisiatif DPR



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II. Foto: Prima/rvl

DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (P3) sebagai RUU inisiatif DPR. Persetujuan ini diambil usai sembilan Fraksi DPR RI menyampaikan pandangan masing-masing dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (8/2).

“Apakah RUU usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan disetujui menjadi RUU usul inisiatif DPR RI?” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. “Setuju,” jawab peserta rapat diikuti ketukan palu sebagai tanda persetujuan. Sebelum dimintai persetujuan oleh Dasco, masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya terkait RUU tersebut.

Pembahasan RUU tersebut pasca pengesahan ini akan dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Dari sembilan fraksi, diketahui hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) yang tegas menolak RUU ini sebagai RUU inisiatif

DPR. Juru bicara F-PKS Bukhori dalam laporannya menyatakan, fraksinya menolak pengambilan keputusan mengenai RUU tersebut karena minimnya pembahasan yang dilakukan di Badan Legislasi.

“Fraksi PKS DPR RI dengan tegas menolak pengambilan keputusan mengenai RUU ini karena pembahasan yang dilakukan di Baleg masih sangat sedikit hanya tiga kali rapat, kami berterima kasih kepada pimpinan DPR RI yang sudah mengizinkan F-PKS untuk membacakan pandangan fraksinya di depan,” kata Bukhori. ■ tn/sf.

Komisi I Dorong STIN Tingkatkan Implementasi Nilai Tri Dharma Perguruan Tinggi



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI meninjau Kampus STIN. Foto: Ayu/nvl

Komisi I DPR RI mendorong Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) agar terus meningkatkan implementasi dari nilai Tri Dharma Perguruan Tinggi. Khususnya dalam bidang penelitian, guna mewujudkan visi STIN. Adapun diketahui visi STIN adalah menjadi perguruan tinggi intelijen bertaraf internasional (World Class Intelligence College), yang mempunyai keunggulan dan kewibawaan dalam mendukung terwujudnya keamanan nasional.

“Kunjungan kami ke STIN bermaksud ingin mendalami sekaligus melakukan pengawasan terhadap beberapa hal. Salah satunya implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi terhadap perkembangan dunia intelijen,” ungkap Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI meninjau Kampus STIN, di Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/2).

Hal tersebut, lanjut Anton, sesuai dengan amanat Undang-Undang MD3 (MPR RI, DPR RI, DPD RI, dan DPRD) terkait fungsi pengawasan DPR RI. Dari penjelasan Sestama BIN Komjen. Pol Bambang Sunarwibowo dan paparan Gubernur STIN Laksamana Muda TNI Ivan Yulivan, Komisi I DPR RI mengapresiasi upaya BIN dan STIN untuk mewujudkan STIN menjadi perguruan tinggi intelijen bertaraf internasional.

“Apa saja upaya tersebut, tentu tidak bisa kami sebutkan di sini (bersifat kerahasiaan, **RED**). Namun yang pasti, kami meyakini bahwa upaya tersebut sangat baik untuk mewujudkan STIN menjadi perguruan tinggi intelijen bertaraf internasional. Hal tersebut tentu harus kita apresiasi,” pungkas politisi Partai Demokrat itu. ■ ayu/sf

Digital Dividend Dapat Dimanfaatkan untuk Akselerasi Layanan Seluler 4G

Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah mendukung pemanfaatan *digital dividend* atau spektrum frekuensi rentang 700 Mhz untuk mengakselerasi layanan telekomunikasi dan konektivitas 4G dan 5G di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di wilayah *blank spot*.

Hal itu disampaikan saat pertemuan Komisi I DPR RI dengan Vice President Network Service Management PT Telkomsel Wilayah Jabodetabek - Jabar di Tangerang, Banten, Jumat (4/2). Dalam pertemuan tersebut dibahas

Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah. Foto: Anne/nvl



Komisi I Kunjungi Seskoad di Bandung

Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Bandung, Jawa Barat. Pada kunspek kali ini, tim Komisi I DPR RI melakukan rapat dengar pendapat dengan jajaran Seskoad untuk mengetahui peran institusi tersebut serta menyerap aspirasi yang akan mereka sampaikan.

Bertindak sebagai ketua tim, Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon mengapresiasi sambutan pihak Seskoad. “Kunspek kali ini, tim ingin mengetahui sejauh mana peran Seskoad dalam menyiapkan Kader

ketersediaan, kapasitas, dan kualitas layanan telekomunikasi Telkomsel, khususnya di wilayah Provinsi Banten.

“Apa sudah ada koordinasi dengan Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) terkait *digital dividend* ini, karena ini yang akan menjadi harapan kita untuk bisa memperluas akses-akses komunikasi untuk daerah Lebak dan Pandeglang (Banten),” tanya politisi Partai Demokrat ini.

Rizki menilai, pemanfaatan *band 700 Mhz* sangat membantu pemerataan pembangunan infrastruktur digital, terutama di kontur wilayah perbukitan yang belum tersentuh sinyal komunikasi atau *blank spot*. Misalnya, daerah Lebak, Banten, yang lokasinya tidak jauh dari ibu kota, namun masih terdapat banyak titik *blank spot*.

“Di Pandeglang ada potensi sangat besar karena sedang dibangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), jalan tolnya dari Jakarta - Tanjung Lesung sebentar lagi mau jadi, tetapi masih banyak warga kami yang belum

Anggota Komisi I DPR RI
Fadli Zon. Foto: Agung/nvi

Pemimpin TNI AD masa depan yang handal, profesional, serta adaptif terhadap perubahan,” katanya saat rapat di Gedung Seskoad, Bandung, Kamis (3/2).

Lebih lanjut politisi Partai Gerindra itu mengatakan, kedatangan Komisi I DPR RI ke Seskoad tersebut merupakan

ter-cover jaringan sinyal. Kalau dari kunjungan kami beberapa kali dengan Telkomsel memang salah satu permasalahan *blank spot* adalah kontur wilayah,” jelas Rizki.

Lebih lanjut, ia menjelaskan saat ini Komisi I DPR RI akan membahas revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Salah satunya mengatur frekuensi emas 700 Mhz, yang saat ini dalam proses *Analog Switch Off (ASO)*. Diketahui, migrasi TV Analog ke digital akan selesai pada 2 November 2022. Setelah, itu frekuensi 700 Mhz akan dialihkan untuk layanan *broadband*.

“Banyak slot-slot frekuensi yang menjadi bonus untuk kepentingan *broadband* Indonesia. Dengan adanya ASO dan *digital dividend* ini, apakah sudah ada koordinasi untuk Telkomsel dengan Kominfo untuk bisa merealisasikan seluruh desa bisa ter-cover dengan jaringan 4G,” sambung legislator dapil Banten I itu.

■ ann/sf



bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pertahanan dalam bidang pengawasan. Dimana Komisi I DPR RI turut melakukan pengawasan terhadap mitra-mitranya salah satunya di bidang pertahanan dan militer.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi I DPR RI Alimin Abdullah menyatakan tanggapannya terkait urgensi institusi pendidikan bagi perwira itu. Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, Seskoad adalah lembaga yang penting, sehingga Komisi I DPR RI juga dapat mengambil pandangan terkait beberapa hal.

Jadi, tak hanya pengawasan saja, kedatangan Komisi I DPR RI ke sekolah itu juga berpotensi untuk menjaring pendapat seputar legislasi, misalnya berkaitan dengan regulasi yang mengatur soal pertahanan dan keamanan. “Karena dari sekolah ini menekankan karakter kepemimpinan, lahir para jenderal, barangkali kami bisa dapat masukan,” kata Alimin.

Selain itu, ia turut mengapresiasi upaya Seskoad yang berinovasi melakukan pembelajaran selama pandemi Covid-19 dengan tetap mengedepan kesehatan dan keselamatan perwira yang tengah melangsungkan pendidikan. Diharapkan Seskoad tetap terus adaptif dan mampu meningkatkan kualitas peserta didiknya dari masa ke masa. ■ ah/sf

Komisi II Tinjau Penyelenggaraan MPP Kulon Progo

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (3/2). Kegiatan ini dilaksanakan Komisi II DPR dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, terhadap pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat di wilayah Kulon Progo, khususnya di tengah pandemi Covid-19.

“Jadi kita ingin memastikan bahwa walaupun di masa pandemi ini ya proses penyelenggaraan pemerintahan

itu tetap berlangsung dan kemudian pelayanan publik itu juga tetap bisa terjaga dengan baik,” ungkap Doli. Komisi II DPR RI menilai pelayanan publik yang diselenggarakan MPP di Kabupaten Kulon Progo telah dilakukan secara terpadu dan terintegrasi.

Hal ini terlihat dari masyarakat yang dapat mengurus berbagai jenis penyelenggaraan administrasi seperti pembuatan e-KTP, SIM, perpanjangan STNK dan izin usaha bagi UMKM dalam satu atap. “Kita juga langsung melihat bagaimana orang bisa datang membuat e-KTP ya, selesai dalam sekian menit. Kemudian orang memperpanjang STNK

bisa sekian menit selesai, mengurus izin usaha untuk UMKM juga bisa berlangsung dengan cepat,” kata Doli.

Politisi Partai Golkar tersebut mengatakan, pihaknya mengapresiasi kemudahan dalam mengakses pelayanan publik yang diselenggarakan MPP di Kabupaten Kulon Progo. Ia menilai hal tersebut dapat menjadi contoh bagi daerah lain “Mal Pelayanan Publik (Kulon Progo) sudah kami lihat, bagus sekali ya. Ini mungkin juga nanti perlu jadi contoh di daerah-daerah yang lain,” apresiasi Doli.

Legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara III tersebut berharap penyelenggaraan MPP seperti di Kulon Progo dapat dikembangkan di seluruh daerah di tanah air. Ia berharap jumlah MPP ke depannya semakin banyak dan tersedia mulai dari tingkat kota hingga kecamatan. “Pelayanan publik yang seperti ini bisa dikembangkan secara lebih baik di seluruh daerah, untuk ke depannya tentu harus makin banyak di setiap kota atau bahkan bisa diturunkan di tingkat kecamatan,” tutup Doli. ■ rr/sf



Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat meninjau Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Kulon Progo. Foto: Rizki/nvl

Komisi II: MPP Smart Salatiga Percepat Pelayanan Publik



Komisi II DPR RI meninjau MPP Smart Kota Salatiga. Foto: Sofyan/nvl

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim mengapresiasi kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) Smart Kota Salatiga. Menurutnya, MPP Smart memberikan kemudahan bagi masyarakat Salatiga dalam mendapatkan pelayanan publik seperti pengurusan perizinan hingga mengurus administrasi pribadi. Selain itu, kehadiran MPP ini menjadi bagian dari keinginan pemerintah dalam reformasi birokrasi dan memperpendek hierarki perizinan.

“Kami mengapresiasi Kota Salatiga yang cepat membangun MPP. Dengan adanya MPP ini pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih mudah dan lebih cepat, sehingga masyarakat maupun kemungkinan investor-investor untuk datang, akan mendapatkan kepastian oleh sistem yang terjamin,” jelas Luqman usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI meninjau MPP Smart Kota Salatiga,

di Salatiga, Jawa Tengah, Kamis (3/2). Komisi II DPR RI diterima langsung oleh Wali Kota Salatiga Yuliyanto.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai, dengan adanya MPP Smart Salatiga ini, ada perbedaan signifikan dalam pengurusan izin maupun administrasi, dibanding sebelum adanya MPP. Menurutnya, sepanjang persyaratan sudah lengkap, secara umum pengurusan perizinan berusaha sudah sangat cepat. Bahkan dalam hitungan menit sudah bisa selesai. Kendati diakui masih ada sejumlah perizinan yang membutuhkan waktu, misalnya persetujuan pendirian bangunan, karena membutuhkan rekomendasi dari dinas terkait.

“Tapi di luar persetujuan pendirian bangunan, secara umum kita melihat (pelayanan perizinan kepada masyarakat) sudah sangat cepat. Selain sangat cepat, juga bisa diakses dari luar. (Masyarakat) tidak aris datang ke (MPP) sini. Masyarakat bisa (mengakses) dari

rumahnya masing-masing, mengurus perizinan melalui mekanisme OSS (Online Single Submission) yang diterapkan oleh MPP Salatiga ini,” kata Luqman sembari mendorong kepada instansi vertikal yang belum ada di MPP Smart Salatiga untuk segera bergabung.

Selain itu, Luqman mengapresiasi kemudahan aksesibilitas yang diberikan MPP Smart Salatiga kepada penyandang disabilitas atau difabel. “Saya melihat adanya aksesibilitas bagi kaum penyandang difabel, aksesnya mudah bagi difabel. SOP untuk masyarakat difabel dalam mengakses layanan bisa dipastikan. Kita menyaksikan sendiri, bagaimana jika masyarakat difabel datang, langsung dapat nomor antrean. Ada petugas yang memprioritaskan pelayanan yang lebih khusus. Sehingga bagi masyarakat difabel, sama sekali tidak ada hambatan mengurus perizinan di MPP Kota Salatiga ini,” tandas legislator dapil Jateng VI itu. ■ sf

Komisi III Apresiasi Kinerja Polda Kalsel dalam Penyelesaian Kasus Tindakan Asusila

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh mengapresiasi kinerja Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dalam penyelesaian kasus tindakan asusila yang terjadi di wilayah Kalsel. Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, tindakan tegas Polda Kalsel terhadap oknum polisi yang melakukan tindakan asusila terhadap salah satu Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin dinilai sudah tepat.

“Langkah-langkah yang dilakukan Polda Kalsel terhadap oknum polisi berinisial BT itu sudah tepat. Tindakan tegas yang telah dilakukan yaitu berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH),” ucap Pangeran usai memimpin pertemuan Komisi III DPR RI dengan Kapolda Kalsel, Kepala Kejati Kalsel, Ketua Pengadilan Tinggi Kalsel, dan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, di Mapolda Kalsel, Banjarmasin, Kamis (3/2).

Dengan dilakukannya PTDH, maka oknum polisi berinisial BT sejak hari Sabtu, 29 Januari 2022 statusnya sudah resmi bukan anggota Polri, dan kembali menyandang status warga sipil. Oleh karena itu, Pangeran berharap kepada Kapolda Kalsel, Kajati Kalsel hingga Kepala Pengadilan Tinggi untuk dapat membantu dan memperhatikan masa depan mahasiswa korban asusila BT. “Hasil dari pertemuan kali ini nantinya kita (Komisi III DPR RI) akan sampaikan pula kepada Kapolri, Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung,” ujar Pangeran.

Sementara itu, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikwanto menegaskan bahwa



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh. Foto: Gerald/nvi

”

SEMOGA APA YANG DIBERIKAN DAPAT SEDIKIT BANYAK MENGOBATI APA YANG TELAH TERJADI KEPADA KORBAN, WALAUPUN TIDAK SEMUA BISA DIKEMBALIKAN

pihaknya akan terus memberikan *coaching clinic* kepada personel Polda Kalsel untuk menjadi anggota Polri yang baik, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Kapolda Kalsel menyampaikan bahwa pihaknya

akan memberikan bantuan terbaik kepada korban asusila BT, khususnya untuk masa depannya. “Semoga apa yang diberikan dapat sedikit banyak mengobati apa yang telah terjadi kepada korban, walaupun tidak semua bisa dikembalikan,” ucap Kapolda Kalsel dalam laporannya.

Sementara itu, Rektor ULM Sutarto Hadi yang turut hadir mengaku mengapresiasi adanya atensi langsung dari Komisi III DPR RI atas kasus asusila yang menimpa mahasiswa ULM. “Kami apresiasi atas penjelasan Kapolda, Kejaksaan Tinggi dan Ketua Pengadilan atas kasus yang menimpa mahasiswi kami. Komisi III telah memberikan penekanan pentingnya agar persoalan ini tidak terulang lagi di kemudian hari,” kata Rektor ULM. ■ opi/sf

Komisi IV Minta Kementan Segera Atasi Hama Tikus di Sragen



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat memimpin Kunspek Komisi IV DPR RI. Foto: Novel/nvl

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta Kementerian Pertanian

(Kementan) untuk lebih komprehensif dalam melakukan pendampingan petani Sragen dalam menghadapi permasalahan serangan hama tikus. Kementan juga diminta cepat memberikan solusi sertaantisipasi terkait hama tikus yang mengganggu lahan sawah para petani.

Hal ini disampaikan Dedi usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI meninjau secara langsung lahan sawah milik petani yang menggunakan arus listrik untuk mengatasi hama tikus di Desa Jambanan, Kecamatan Sidoharjo, Sragen, Jawa Tengah, Sabtu (5/2).

"Kami menegaskan pada jajaran Kementerian Pertanian untuk lebih komprehensif dalam melakukan

pendampingan para petani. Kalau di sawah ada hama tikus maka harus cepat penanganannya, kemudian dicari solusinya jangan menunggu orang (petani) pasang setrum (listrik). Penanganan hama tikus dengan menggunakan jaringan listrik yang tidak direkomendasikan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan," jelasnya.

Lebih lanjut politisi Partai Golkar itu juga menyinggung persoalan jumlah hingga kesejahteraan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang semakin berkurang. "Kita menyadari jumlah PPL makin ke sini makin sedikit, padahal wilayahnya luas, terlebih lagi berstatus honorer, kalau zaman dulu, sepeda motor PPL paling bagus, sekarang malah paling butut," tuturnya. ■ nvl/sf

Renny Astuti Dorong Program Kementan Tingkatkan Kesejahteraan Petani

Anggota Komisi IV DPR RI Renny Astuti meminta Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dapat memastikan seluruh program dan kegiatan Kementan dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap peningkatan produksi dan peningkatan kesejahteraan petani. Perlu adanya strategi dan upaya yang dilakukan Kesetjenan Kementan. Sehingga Setjen juga perlu memberikan evaluasi yang sudah diupayakan di tahun 2021 dalam menjaga kestabilan peningkatan produksi.



Anggota Komisi IV DPR RI Renny Astuti. Foto: Arief/nvl

"Kami juga meminta program P2L (Pekarangan Pangan Lestari) dan bimtek (bimbingan teknis) ini menjadi prioritas.

Karena memang kenyataannya program ini banyak sekali manfaatnya bagi masyarakat, khususnya petani," katanyadalam RDP Komisi IV DPR RI dengan Eselon I Kementan di Gedung Nusantara, Senayan, Rabu (2/2).

Kepada Ditjen Perkebunan yang memiliki pagu alokasi anggaran sebesar Rp1,1 triliun, Renny meminta bibit-bibit yang diberikan kepada masyarakat memiliki kualitas baik. "Karena kenyatannya kemarin bibit-bibit yang diberikan masih sangat kecil dan pendek, sehingga cepat mati setelah ditanam," usul politisi Partai Gerindra tersebut. ■ sf

Komisi IV Apresiasi Inovasi BBPI Semarang

Komisi IV DPR RI mengapresiasi berbagai teknologi, inovasi, rekayasa, standardisasi dan sertifikasi teknik penangkapan ikan oleh Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) Semarang yang dinilai ramah lingkungan. Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini saat memimpin Tim Kunspek Komisi IV DPR RI meninjau BBPI di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (4/2).

“Komisi IV DPR RI melihat langsung di Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang ini dapat membuat semacam apartemen Ikan sebagai tempat berpijah (berkembang biak) yang merupakan salah satu bentuk bantuan pemerintah,” ujar Anggia.

Legislator dapil Jawa Timur VI ini menambahkan bahwa konsep



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini saat meninjau sarana dan prasarana BBPI. Foto: Oji/nvl

apartemen ikan bertujuan untuk memulihkan ketersediaan (stocks) sumberdaya ikan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik guna meninjau BBPI Semarang.

“Komisi IV DPR RI ingin menggali informasi secara utuh dan langsung terkait teknologi, inovasi, rekayasa, standardisasi dan sertifikasi teknik penangkapan ikan yang ramah lingkungan,” pungkas Anggia. ■ oji/sf

DAS Kawasan Menoreh Dapat Menjadi ‘Role Model’ Kawasan Hutan Lain

Anggota Komisi IV DPR RI Djarot Saiful Hidayat mengatakan kawasan hutan merupakan sumber daya alam bagi kepentingan pembangunan sektor kehutanan dan sektor di luar kehutanan. Oleh karena itu pengawasan kawasan hutan terhadap penanaman dan upaya pelestarian rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) menggunakan tanaman yang produktif yang berada di Kawasan Perbukitan Menoreh di Kulon Progo, Daerah Istimewa



Anggota Komisi IV DPR RI Djarot Saiful Hidayat saat memimpin Komisi IV DPR RI ke DIY. Foto: Arief/nvl

Yogyakarta, bisa di jadikan *role model* bagi kawasan hutan lainnya.

Demikian dikatakan Djarot saat

memimpin kunspek Komisi IV DPR RI di Perbukitan Menoreh, Kulon Progo, DIY, Jumat (4/2).

“Penanaman atau pemeliharaan lingkungan di sekitar daerah aliran sungai yang merupakan kewajiban dari pemegang izin pertambangan dan penggunaan kawasan hutan yang diberikan oleh kementerian ini bisa dijadikan *role model*, bahwa kelestarian rehabilitasi DAS itu bisa menggunakan tanaman yang produktif. Sehingga ke depannya bisa menjadi agroforestri jadi tanaman-tanaman yang produktif,” jelas Djarot.

Usai meninjau lokasi rehabilitasi DAS, Djarot menilai tanaman produktifnya cukup bagus. Ke depan rehabilitasi DAS dapat terus dikembangkan. Jadi varietas unggulan kita di masing-masing daerah itu juga menjadi perhatian untuk dikembangkan,” pesan legislator PDI-Perjuangan itu. ■ afr/sf

Komisi VI Berharap Program Ultra Mikro Terus Dikembangkan

Saat ini Indonesia menghadapi varian baru Covid-19 yaitu Omicron, bantuan kepada ultra mikro telah terbukti mampu membangkitkan perekonomian bangsa, UMKM punya daya tahan meskipun kondisi perekonomian nasional dalam kondisi sulit. Wakil Ketua Komisi VI Gde Sumarjaya Linggih mengungkapkan Komisi VI DPR RI berharap program ultra mikro harus terus menerus dikembangkan, kredit yang mudah diakses dan tidak memberatkan, hingga makin banyak rakyat Indonesia, khususnya di Jawa Timur, bisa menikmatinya.

“Melihat kenyataan ini maka Komisi VI DPR RI melihat bahwa program ultra mikro harus terus menerus dikembangkan hingga makin banyak rakyat Indonesia, khususnya Jawa Timur untuk menikmatinya,” papar Demer, sapaan akrab Gde

”

UMKM PUNYA DAYA TAHAN MESKIPUN KONDISI PEREKONOMIAN NASIONAL DALAM KONDISI SULIT

Sumarjaya, saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Surabaya, Jawa Timur, Kamis (3/2).

Menurut Demer, secara umum tujuan kunjungan kerja ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang realisasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan rencana serta program kerja yang akan dilakukan, terutama yang berkaitan dengan bidang tugas serta lingkup Komisi VI DPR RI, yaitu perdagangan, koperasi/ usaha kecil dan menengah (UKM), BUMN, dan investasi.

Pada kesempatan ini, Komisi VI DPR RI melakukan diskusi dengan PT. BRI (Persero), Tbk, PT. Pegadaian (Perseo), PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk mengetahui implementasi program ultra mikro secara dekat agar memahami kendala dan masalahnya. Selain itu Komisi VI juga ingin mendapatkan gambaran kinerja perusahaan terkait pelaksanaan ultra mikro oleh BRI, Pegadaian, dan PNM.

“Maka Komisi VI DPR RI ingin melihat dan berdialog secara langsung implementasi secara langsung dan melihat masalah yang dihadapi sehingga nantinya Komisi VI dapat mengambil keputusan politik untuk mendukung program ultra mikro yang sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia,” ungkap politisi Partai Golkar ini.

■ eko/sf

Wakil Ketua Komisi VI
Gde Sumarjaya Linggih.
Foto: Eko/nvl



DPR Dorong Sosialisasi Masif Program *Holding UMi*



Anggota Komisi VI DPR RI ST. Ananta Wahana.
Foto: Tasya/nvl

Anggota Komisi VI DPR RI ST. Ananta Wahana menyoroti masih banyaknya masyarakat Indonesia yang belum bisa mengakses layanan keuangan. Ia meminta agar hal ini dijadikan sebagai peluang oleh BUMN *Holding Ultra Mikro (UMi)* yang terdiri dari PT BRI, PT

Pegadaian, dan PT PNM untuk hadir sebagai lembaga keuangan yang dapat memberikan bantuan permodalan terjangkau bagi rakyat. Karenanya ia mendorong optimalisasi peran kantor cabang BRI maupun Pegadaian untuk mensosialisasikan secara masif program *Holding UMi* agar masyarakat tahu keberadaan program permodalan dan peminjaman dana dari pemerintah.

“Kami sebetulnya berharap pada BRI yang cabangnya luar biasa unitnya ada di desa-desa, Pegadaian yang ada di tengah-tengah masyarakat, maupun PNM yang ada di tengah-tengah masyarakat juga, saya pikir ini mesti harus terlibat lebih proaktif

mensosialisasikan,” ujar Ananta usai menghadiri pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan PT BRI, PT Pegadaian, dan PT PNM dalam rangka pengawasan pelaksanaan ultra mikro, di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (3/2).

Untuk memaksimalkan penyaluran bantuan permodalan, politisi PDI-Perjuangan ini mengatakan, *Holding UMi* perlu memperhatikan syarat yang harus dipenuhi. Ia mencontohkan syarat yang menjadi perhatian pada program ‘Wirausaha Pemula’ yang menetapkan batasan umur maksimal 45 tahun. Menurutnya, hal ini kurang relevan mengingat masyarakat di atas 45 tahun kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bantuan itu. ■ nap/sf

Komisi VI: Jangan Sampai Besaran Bunga Pembiayaan UMi ke UMKM Berbeda Aturan



Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun.
Foto: Ridwan/nvl

Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun berharap jangan sampai besaran bunga pembiayaan dari BUMN *Holding Ultra Mikro (UMi)* kepada UMKM berbeda antara yang tertulis di aturan dengan fakta di lapangan. Sebab, menurutnya, jika merujuk pada pembiayaan UMKM dalam Program Mekaar oleh PT PNM, bunga yang sampai pada konsumen bisa sampai sebesar 20 persen.

“Padahal, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pembiayaan Ultra Mikro, BLU Pusat Investasi Pemerintah menyatakan bunganya rendah, hanya 1-3 persen. Nah, soal bunga ini harus jadi perhatian. Jangan sampai pembiayaan yang berasal dari *Holding BRI* ini begitu juga dengan bunga yang begitu tinggi,” ujar Rudi saat mengikuti Kunspek Komisi VI DPR RI ke BUMN *Holding Ultra Mikro* di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (3/2).

Pola pembiayaan modal yang berbunga tinggi ini, menurutnya, tak ubahnya seperti rentenir. Karena itu, jika BUMN *Holding UMi* ini juga ingin memberikan bantuan pembiayaan modal melalui program SENYUM, maka harus jelas dulu berapa juta nasabah yang akan diberikan kredit, cakupan realisasinya, hingga besaran bunganya.

■ rdn/sf

Komisi VII Dukung Upaya Pengembangan KIM

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon mendukung upaya pengembangan dan perbaikan Kawasan Industri Medan (KIM) di Sumatera Utara agar tidak kalah maju dan mampu bersaing dengan kawasan industri swasta. Salah satu persoalan yang kini dihadapi KIM terkait masalah banjir yang kerap terjadi dalam area kawasan industri.

“Kalau kita lihat KIM ini adalah termasuk kawasan industri awal milik BUMN, dan sudah termanfaatkan kurang lebih sekitar 80 persen. Hanya memang yang harus kita dukung adalah pengembangan-pengembangan selanjutnya,” kata Dony usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI meninjau KIM di Medan, Sumatera Utara, Sabtu (5/2).

Politisi PDI-Perjuangan itu mengatakan, kawasan-kawasan industri swasta sudah mulai dengan konsep 4.0 oleh karenanya kawasan industri milik

negara juga harus mempersiapkan diri untuk bisa mengikuti perkembangan jaman. “Mereka harus siap untuk maju ke arah itu, dan ini harus kita dukung termasuk bagaimana mencari jalan keluar dari masalah banjir yang dialami mereka,” ujarnya.

Dony menyampaikan, Komisi VII DPR akan melanjutkan permasalahan banjir

”

SAYA BERHARAP ADA INDUSTRI-INDUSTRI BARU, DAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN BESAR YANG ADA DI SITU BISA MENJADI BAPAK ASUH UNTUK INDUSTRI KECIL YANG AKAN BERKEMBANG

di KIM tersebut dengan berkoordinasi bersama Komisi V DPR, untuk selanjutnya bisa ditindaklanjuti kepada Kementerian PUPR yang merupakan mitra kerjanya. “Karena ini adalah awal dari adanya kawasan industri di Sumatera, jadi memang saya berharap ada pengembangan yang maju untuk mengikuti perkembangan zamannya dan fasilitasnya juga sesuai dan sama seperti dengan kawasan kawasan industri yang baru,” imbuhnya.

Dony berharap ada pemanfaatan yang lebih maksimal dari sisi bisnis di KIM. “Kali ini Perusahaan Gas Negara juga sudah masuk, namun memang masih ada beberapa tuntutan yakni terkait masalah harga gas dan industrinya bisa masuk di dalam tujuh kategori yang boleh menerima harga gas 6 dollar AS. Mereka harus cepat bergabung dengan Kementerian Perindustrian untuk mengusulkan agar mereka mendapatkan harga gas yang sesuai dengan Perpres,” kata Dony.

Selain itu ia berharap Industri besar bisa ikut mendukung dan membina industri-industri kecil agar dapat berkembang menjadi industri yang besar nantinya. “Saya berharap ada industri-industri baru, dan perusahaan-perusahaan besar yang ada di situ bisa menjadi bapak asuh untuk industri kecil yang akan berkembang. Jadi mereka membina industri kecil dan kebutuhan yang menunjang industri mereka supaya mereka juga menjadi besar. Jangan dikuasai oleh industri besar itu sendiri maka tidak akan berkembang. Saya harap usaha lokal ataupun usaha industri kecil bisa masuk kesitu dengan bapak asuh yang dilakukan oleh industri-industri yang besar,” pungkas legislator dapil Jawa Barat XI itu. ■ dep/sf



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon saat memimpin Kunspek Komisi VII DPR RI meninjau Kawasan Industri Medan (KIM). Foto: Dep/mvl

Komisi VII Dorong Kapasitas Produksi PT Inalum

Indonesia memiliki sumber bauksit sebagai *raw material* alumunium yang cukup besar, bahkan merupakan peringkat keenam terbesar di dunia untuk

pemilik cadangan bauksit. Namun ironisnya, sumber daya bauksit belum dimanfaatkan secara optimal, bahkan hingga kini Indonesia mengimpor aluminium setiap tahunnya.



Komisi VII DPR RI meninjau alur produksi alumunium di PT Inalum (Persero). Foto: Bianca/nvl

Demikian mengemuka saat Komisi VII DPR RI meninjau langsung alur produksi alumunium di PT Inalum (Persero) di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, Sabtu (5/2).

Anggota Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengatakan, pihaknya mendorong sinergi antara PT Inalum dengan PT PLN dalam hal penyediaan sumber daya listrik guna memenuhi kebutuhan daya listrik yang dapat menunjang peningkatan kapasitas produksi PT Inalum. "Mereka (PT Inalum) sekarang ada kebutuhan daya listrik yang sangat dibutuhkan untuk menaikkan kapasitas produksi mereka dari 250.000 ton ke 500.000, kita mendorong agar ada sinergi antara Inalum dengan PLN di Asahan 1 dan Asahan 3," ujarnya.

Lamhot menambahkan, peningkatan kapasitas produksi tersebut bertujuan untuk mengurangi angka impor alumunium dari luar negeri. "Dengan mengurangi angka importasi ini tentunya ini akan menambah devisa kita," tandas politisi Golkar itu. ■ bia/sf

Jargas Harus Segera Gantikan LPG

Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam menegaskan, Jaringan Gas (Jargas) berupa pembangunan infrastruktur pipa gas bumi untuk menyalurkan kebutuhan energi gas bagi rumah tangga harus segera terealisasi. Jargas ini diharapkan segera menggantikan gas tabung LPG yang masih digunakan luas oleh masyarakat.

"Jargas kota itu memang sudah jadi program pemerintah. Dan Komisi VII sangat mendukung program ini, karena sangat membantu masyarakat perkotaan dalam mengakses kebutuhan energi di rumah. Ini sebagai alternatif energi LPG," kata Hisjam di hadapan otoritas PT.

Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Kementerian ESDM dalam pertemuan Komisi VII di Kantor PGN, Medan, Sumatera Utara, Sabtu (5/2).

Menurut politisi Partai Golkar ini, penggunaan gas LPG untuk rumah tangga dan industri memang harus segera dikurangi, karena kebutuhan subsidiya sangat besar hampir sekitar Rp60-80 triliun per tahun. Ini pasti sangat membebani APBN. Masalahnya jaringan pipa belum terbangun luas.

Contohnya, lanjut legislator dapil Jawa Timur V tersebut, di Jawa sudah terbangun Jargas dari Gresik ke Semarang. Namun, dari Gresik ke Cirebon sudah bertahun-tahun belum dibangun. Sekarang sudah diambil alih Kementerian ESDM melalui

penganggaran APBN. Diharapkan pembangunan Jargasnya tidak tertunda kembali. ■ mh/sf

Anggota
Komisi VII
DPR RI
Ridwan
Hisjam.
Foto: Husen/nvl





Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang. Foto: Tiara/nvl

Penyelenggaraan Haji Masih Tunggu Kepastian, Pemerintah Harus Beri Penjelasan ke Masyarakat

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengimbau kepada pemerintah untuk dapat memberi penjelasan kepada masyarakat terkait kepastian penyelenggaraan ibadah haji yang sampai dengan saat ini belum dapat dipastikan oleh Pemerintah Arab Saudi. Hal ini sebagai bentuk kewaspadaan munculnya berita-berita hoaks yang beredar di masyarakat dan menyudutkan pemerintah dari sisi kebijakan terkait haji.

"Bagi kami (Komisi VIII) ini penting, karena kebijakan dari Pemerintah Arab Saudi terkait haji ini kita belum tahu seperti apa. Tapi paling tidak dari pemerintah sudah memberi

gambaran kepada masyarakat terkait kuota daftar tunggu calon jemaah haji. Jadi nantinya ada gambaran bagaimana cara membaginya atau bahkan bagaimana jika kuotanya nanti penuh atau tidak," jelas Marwan usai melakukan pertemuan dengan jajaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, di Surabaya, Jumat (4/2).

Terkait hal ini, menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, belum ada keputusan yang dapat diambil, namun setidaknya dari hasil Kunjungan Komisi VIII DPR RI ke Jatim pada hari ini dapat memberi gambaran untuk nantinya dibahas dan didiskusikan di dalam rapat Panja Komisi VIII DPR RI bersama dengan pemerintah. "Bagaimana cara membaginya itu perlu kita didiskusikan,

namun nanti di dalam Panja bersama pemerintah kita sudah punya gambaran seperti apa," ungkap Marwan.

Pada prinsipnya Komisi VIII DPR RI, lanjut politisi dapil Sumatera Utara II itu, jika nantinya sikap yang diputuskan adalah calon jemaah haji tidak berangkat 100 persen, representasi dari wilayah dan juga proporsional, maka sikap yang akan diambil adalah merubah SSKOHAT. Dan yang penting juga harus dilakukan pendekatan antara pihak Pemerintah Arab Saudi dan juga sosialisasi ke masyarakat mengenai hal ini.

"Bagi kami sekarang mulai berpikir, kalau tidak memenuhi kuota 100 persen itu bagaimana cara mengambil keputusannya, siapa yang mau diberangkatkan, katakan saja 50 persen : 50 persen itu siapa (calon jemaah haji) yang mau diambil. Kalau potong daftar urut itu gampang, tapi kalau kebijakan yang diambil oleh Arab Saudi itu harus melalui SSKOHAT, sistem dari SSKOHAT kan sudah ada di daftarnya, dan belum tentu Jatim sudah termasuk di dalamnya. Jika demikian, penting untuk disosialisasikan ke masyarakat mengenai keputusan yang akan diambil Saudi nantinya," tutup Marwan mengakhiri pernyataannya. ■ tra/sf

Baleg Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas ke Sulsel



Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi saat memimpin pertemuan Baleg DPR RI dengan Sekda Sulsel dan jajaran Forkopimda. Foto: Oji/rvi

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2022, ditetapkan sebanyak 40 RUU dan Perubahan Prolegnas Tahun 2020-2024 ditetapkan sebanyak 254 RUU. Demikian diungkapkan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Baleg dalam rangka sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 ke Makassar, Sulawesi Selatan.

“Sosialisasi ini untuk menyebarluaskan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 kepada masyarakat sehingga diharapkan dalam proses pembentukan undang-undang tersebut, masyarakat dapat memberikan masukan-masukan,”

urair Awiek, sapaan akrab Achmad Baidowi dalam sambutannya saat melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel dan jajaran Forkopimda di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Selasa (8/2).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menambahkan masyarakat perlu mengetahui rencana pembentukan undang-undang yang akan mengatur kehidupan masyarakat dan pada akhirnya setiap RUU yang akan ditetapkan menjadi Undang-Undang senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Awiek mendorong terjalinnya komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Daerah terkait proses pembentukan undang-undang yang sudah ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022

dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024. “Kami juga ingin menyerap aspirasi masyarakat di daerah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kepentingan terhadap beberapa atau keseluruhan RUU yang ada dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024,” pungkas Awiek.

Sementara itu Sekda Sulsel Abdul Hayat Gani berharap ada harmonisasi desentralisasi terkait semangat otonomi daerah, berbagai program pertanian misalnya sering berjalan masing-masing antara pusat dan daerah. Perlu diperbanyak keterlibatan stakeholder dalam penyusunan rancangan undang-undang, sehingga mampu memberikan warna dan Prolegnas ini bisa selesai tepat waktu.

■ oji/sf

BAKN DPR Pantau Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Kanwil BPN Kaltim

Kemudian pungutan liar dalam proses sertifikasi tanah, khususnya program Pendaftaran Tanah Sertifikat Lengkap (PTSL) ATR/BPN; tata kelola perizinan usaha perkebunan belum sesuai dengan ketentuan; dan rendahnya produktivitas hasil perkebunan. “Untuk itu perlu kami dalami, terkait apa saja kendala-kendala yang menyebabkan masih adanya permasalahan yang tidak bisa ditindaklanjuti,” kata politisi Partai Demokrat itu, seraya

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Wahyu Sanjaya berharap, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), termasuk Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Timur segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Kementerian pada Tahun Anggaran (TA) 2017-2019.

Walaupun BPK telah menetapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun hasil pemeriksaan BPK RI masih menemukan sejumlah permasalahan. Misalnya pada hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian ATR/BPN TA 2019, BPK mengungkapkan terdapat 7 temuan, 13 permasalahan, dan 20 rekomendasi. Dari 13 permasalahan tersebut, ada 1 permasalahan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp218,53 juta.

“Kita melihat ada beberapa masalah yang signifikan dan perlu diperbaiki seperti permohonan atas pelayanan survei, pengukuran dan pemetaan tidak sesuai dengan luas bidang tanah yang sesungguhnya; dan tarif biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi atas pelayanan pengukuran dan pemetaan batas belum diatur dalam peraturan,” ungkap Wahyu usai memimpin pertemuan dengan BPK serta Kanwil BPN Kaltim, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (2/2).

Selain itu, Wahyu mengatakan, hasil Pemeriksaan Kinerja atas

kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform (TOL) tahun 2015 pada semester I tahun 2016 juga mengungkapkan beberapa permasalahan. Misalnya, peraturan-peraturan terkait Redistribusi TOL ada yang tidak relevan dan tidak dapat diimplementasikan. “Pelaksanaan kegiatan Redistribusi TOL hanya merupakan kegiatan legalisasi aset, dan belum meningkatkan kesejahteraan petani; dan kenaikan pendapatan per personal income masyarakat subjek reforma agraria sebagai Indikator Kinerja Utama sasaran program pada Ditjen Penataan Agraria tidak tepat,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Wahyu dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang telah dilakukan BAKN DPR RI dengan pakar agraria/pertanahan dan tata ruang mengungkap beberapa permasalahan agraria dan pertanahan lain seperti; adanya potensi kerugian negara dari jutaan tanah terlantar dari kemacetan penuntasan konflik agraria sehingga menurunkan nilai pembelian dan pajak negara; konflik agraria yang terjadi di banyak daerah sebagai akibat dari proses pemberian izin, pendaftaran, penerbitan, sampai pengawasan setelah penerbitan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya. Foto: Ria/mvl

mengatakan setelah mengumpulkan berbagai informasi BAKN akan membuat rekomendasi terkait permasalahan pertanahan yang terus berulang.

Namun Wahyu juga mengapresiasi, hasil-hasil temuan BPK ini sudah berjalan untuk diselesaikan Kanwil BPN Kaltim. “Kami berharap temuan-temuan itu bisa secepatnya dan tidak terjadi lagi,” imbuh Wahyu. Turut hadir dalam kunjungan ini Wakil Ketua BAKN DPR Anis Byarwati (F-PKS), Subarna (F-Gerindra), Bachrudin Nasori (F-PKB), Achmad Hatari (F-NasDem), serta Amir Uskara (F-PPP). ■ rnm/sf

Tindaklanjuti Keputusan MK, UU P3 Mendesak Diubah



Foto bersama Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI Inosentius Samsul beserta jajaran dengan sivitas akademika di Sulsel. Foto: Hira/mv

Kepala Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal DPR RI Inosentius Samsul menilai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU P3) merupakan suatu kebutuhan yang harus segera dilakukan sebagai tindak lanjut dari Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga, BK Setjen DPR RI menggelar Konsultasi Publik Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, di beberapa kota/daerah di Indonesia dengan mengundang para pakar dan sivitas akademika.

“Dukungan keahlian ini penting sekali, karena kami yakin bahwa kebutuhan untuk dukungan akademik dalam penyusunan naskah dan kebijakan itu sangat penting,” papar Sensi, sapaan akrab Inosentius Samsul, saat dalam memberikan sambutan secara daring dalam Roadshow Konsultasi Publik di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (4/2). Ia menjelaskan, BK

DPR RI saat ini sedang berjuang untuk mempertegas perannya untuk menjadi di ranah legislatif.

Menurut Sensi, meski berbeda dunia, namun dunia akademik dan dunia politik dapat dikolaborasikan. “Berbincang bincang publik yang baik itu akan berkualitas apabila dirunut dengan data dan pemikiran akademik yg kuat. Oleh karena itu, kami menganggap penting adanya kerja sama dan keterlibatan dari para akademisi yang bisa melakukan kajian yang sangat mendalam,” lanjut Sensi sembari membeberkan dalam masukan yang disampaikan oleh MK, ada dua poin utama yang perlu disoroti.

Pertama, pengadopsian metode dalam pembentukan peraturan perundang undangan, dan yang kedua menyangkut partisipasi. “Karena itu pasti kita menemukan banyak hal kekurangan dalam undang-undang ini. Namun karena keterbatasan dalam arti memenuhi urgensi kita pada saat ini, mudah-mudahan ada masukan baru yang apabila tidak menimbulkan tarik-menarik, itu memungkinkan untuk dapat diadopsi dan dimasukkan dalam

revisi (UU P3) kali ini,” harap Sensi.

Senada, Tenaga Ahli Badan Legislasi (Baleg) DPR RI RI Widodo mengungkapkan, melalui konsultasi publik ini menjadi kegiatan yang luar biasa karena dapat memberikannya berbagai macam inspirasi dan masukan, di antaranya seperti pelaksanaan. “Jadi banyak perspektif dan banyak kajian pendapat yang akhirnya menyadarkan kita (seperti) ‘Oh iya, berarti banyak hal kalau di kalangan para akademis saja sudah bisa menyimpulkan berbagai macam persepsi maka tentu apalagi di masyarakat umum’,” terang Widodo.

Dirinya pun menilai, banyaknya saran dan masukan tersebut membantu BK Setjen DPR RI dalam menyempurnakan proses-proses naskah akademik dan juga rancangan undang-undang. “Termasuk konsistensi kita dalam menyusun argumentasi secara akademik dari NA (naskah akademik), kemudahan dari RUU, supaya linear, dan juga supaya bisa mengalir secara jelas sehingga bisa dipertanggungjawabkan,” pungkas Widodo. ■ hal/sf

Komitmen Pacu Kinerja, Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 Harus Lebih Baik



Foto bersama Pimpinan BURT DPR RI, Sekjen DPR RI serta pejabat di lingkungan Setjen DPR RI. Foto: Saum/nvl

Sekretaris Jendral DPR RI Indra Iskandar mengingatkan seluruh jajarannya agar berkomitmen melaksanakan setiap rencana strategis pelaksanaan anggaran tahun 2022 yang telah disusun. Komitmen ini, menurut Indra, tidak hanya diperhatikan oleh pimpinan saja. Akan tetapi juga oleh seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

“Rencana seperti penyusunan rencana kegiatan, pemantauan pagu dan optimalisasi revisi, serta optimalisasi pelaksanaan anggaran harus diperhatikan bukan hanya oleh setiap pimpinan Setjen DPR RI, akan tetapi juga seluruh pegawai,” ucap Indra saat memberikan sambutan pada Rapat

Koordinasi bersama jajaran Eselon I dan II di lingkungan Setjen DPR RI, di Jakarta, Jumat (4/2).

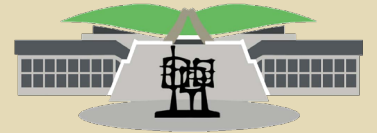
Dalam membahas evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2021, Indra mengakui adanya penurunan nilai Indikator Pelaksanaan Kerja Anggaran (IKPA) DPR RI yang berpengaruh sebesar 40 persen terhadap pencapaian Evaluasi Kinerja Anggaran DPR RI. Oleh karena itu, dirinya mendukung mekanisme kepada pegawai Setjen DPR RI demi memacu kinerja yang lebih baik.

Selain komitmen, dirinya menekankan pada setiap jajaran untuk membangun kerja sama, bekerja keras, dan memperkuat koordinasi seluruh unit kerja. Supaya, pelaksanaan anggaran 2022 berjalan efektif, mencapai sasaran yang ditargetkan, sekaligus bebas



ADANYA PENURUNAN NILAI INDIKATOR PELAKSANAAN KERJA ANGGARAN (IKPA) DPR RI YANG BERPENGARUH SEBESAR 40 PERSEN TERHADAP PENCAPAIAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN DPR RI

dari temuan. “Mari kita buat komitmen, jaga komitmen dan bertanggungjawab dalam komitmen kita bersama, untuk memberikan kinerja terbaik bagi DPR RI,” tutup Indra. ■ ts/sf



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat acara pencahangan pembangunan patung Soekarno di Tugu Trikora, Bitung, Sulawesi Utara, Rabu (9/2). Foto: Gerald/nvl



Foto bersama pelantikan pergantian Pimpinan BURT DPR RI dari Evita Nursanty menjadi Johan Budi (F-PDIP). Pelantikan dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (7/2). Foto: Yoga/nvl



Ketua GKS DPR RI-Parlemen Spanyol DPR RI Andi Yuliani Paris bertukar cenderamata usai menerima *Courtesy Call* Duta Besar Spanyol untuk Indonesia Fransisco De Asis Aguilera Aranda di Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa (8/2). Foto: Prima/nvl

